

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA SAMARINDA (STUDI DI KELURAHAN JAWA KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA)

Maulana Ibrahim¹

Abstrak

Maulana Ibrahim, 2015, "Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu)". Program S.1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman, dibawah bimbingan Ibu Dr. Rita Kala Linggi, M.Si dan Bpk Drs. H. Burhanudin, M.Si.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Pemberdayaan UKM, 1 orang Kepala Seksi Pengembangan Usaha UKM, 1 Orang Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Usaha dan Kemitraan UKM, 1 orang Kepala Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan UKM dan 3 masyarakat Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalau hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu menunjukkan bahwa UKM yang ada di Kota Samarinda khususnya di Kelurahan Jawa yang semakin tahun mengalami peningkatan. Temuan lainnya yang tidak kalah penting dalam penelitian ini adalah adanya kendala/hambatan yang dihadapi Aparatur Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda yaitu tidak proporsionalnya jumlah tenaga Pembina dengan jumlah UKM di Kota Samarinda sehingga tidak maksimalnya pemberdayaan UKM di berbagai daerah yang ada di Kota Samarinda. Iklim usaha yang tidak kondusif juga merupakan kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM yang diakibatkan kurangnya kualitas SDM para pelaku UKM.

Kata Kunci: Peran Dinas, Pemberdayaan, Usahan Kecil Menengah.

¹Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : lanacazze@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam upaya percepatan peningkatan aktifitas perekonomian melalui kebijakan desentralisasi diperlukan adanya suatu instrumen hukum guna lebih memperkuat keberadaan organisasi pemerintah daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah. Instrumen hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, keberadaan dan peran usaha kecil menengah merupakan realitas dalam kegiatan perekonomian khususnya dikalimantan timur, melihat potensi sumber daya yang ada sangat besar untuk terus dikembangkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penguatan ekonomi skala kecil dan menengah yang dipandang menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan untuk menopang ekonomi yang kuat serta terciptanya fundamnetal yang tangguh di wilayah ini.

Kota samarinda memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jumlah unit usaha yang cukup banyak. Unit usaha kecil dan menengah yang ada tersebar dan terbagi dalam beberapa sektor diantaranya; perdagangan, industri, aneka usaha dan jasa, serta berbagai sektor nonformal. Jumlah UKM apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar, namun bila dilihat dari kontribusi yang diberikan UKM masih jauh kalah tertinggal dengan usaha besar. Kondisi seperti ini semakin nampak jelas di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda, karena banyaknya pelaku ekonomi berskala besar yang mengambil peran dalam perekonomian di daerah ini. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur secara lebih adil, merata dan berkesinambungan diperlukan peran semua pelaku ekonomi, tidak terkecuali Usaha Kecil dan Menengah.

Perkembangan usaha kecil dan menengah diberbagai daerah terutama Kalimantan Timur, tidak lepas dari berbagai macam masalah. Permasalahan tersebut meliputi berbagai faktor yaitu; Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, Terbatasnya sarana dan prasarana usaha dalam hal pembinaan UKM, Terbatasnya akses pasar, Kurangnya akses informasi.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda)”.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Definisi peran menurut Suhardono (1994:15) bahwa “peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi perilaku apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan”.

Soerjono Soekanto (1990:268) mengatakan bahwa peran adalah “aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran”.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat dan sesuai kedudukannya dalam suatu jabatan. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi peran dan status tidak dapat dipisahkan, tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri sebagai proses. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat dan peran juga menentukan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Pemberdayaan

Menurut Carlzon dan Macauley sebagaimana dikutip oleh Wasistiono (1998:46) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya.

Carver dan Clatter back oleh Wasistiono (1995:12) mendefinisikan pemberdayaan merupakan “upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberi kontribusi pada tujuan organisasi”.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk memberi atau meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok atau masyarakat, tidak hanya pada bidang politik semata tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi, dengan tujuan memampukan dan memandirikan masyarakat terutamadari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan. Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.

Pembinaan

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan pembinaan adalah “segala satau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna (Musanef, 1991:11).

Menurut Hidayat S (1979:10) pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan,

pembimbingan, pengembangan, simulasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan.

Koperasi

Secara harifah koperasi yang berasal dari bahasa inggris “*Coperation*” terdiri dari dua suku kata, *Co* yang berarti sama dan *Operation* yang berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerjasama dapat disebut koperasi.

Hatta dalam Revrison Baswir (2000:2) menyebutkan koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Usaha Kecil Menengah

M. Tohar (2000:11) mendefinisikan usaha kecil adalah “kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

Menurut Ina Primiana (2009:11) mendefinisikan usaha kecil merupakan “pengembangan kawasan andalan untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor potensi dengan usaha peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

a. Kelebihan Usaha Kecil Menengah

Adapun kelebihan usaha kecil menurut Tohar (2000:27) yaitu usaha kecil pada kenyataannya mampu bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan inflasi mamupun berbagai factor penyebab lainnya. Tanpa subsidi maupun proteksi, usaha kecil mampu menambah nilai devisa Negara khususnya industri kecil disektor informal dan mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat kecil/lapisan bawah.

b. Kelemahan Pengolahan Usaha Kecil

Menurut Tohar (2009:29) kelemahan dan hambatan pengelolaan usah kecil umumnya berkaitan dengan faktor *intern* dari usaha kecil itu sendiri. Kelemahan dan hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber modal yang terbatas kemampuan pemilik.
2. Terlalu banyak biaya dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak mematuhi pembukuan standar.
3. Pembagian kerja yang tidak proporsional dan karyawan sering bekerja diluar prosedur kesepakatan kerja.
4. Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas.
5. Persediaan barang tidak terlalu banyak sehingga beberapa barang kurang laku.
6. Sering terjadi miss manajemen dan ketidakpedulian pengelola terhadap prinsip-prinsip manajerial.

7. Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskan.

Adapun yang menyangkut faktor *ekstern* antara lain sebagai berikut :

1. Resiko dan utang-utang kepada pihak ketiga ditanggung oleh pribadi pemilik.
2. Sering kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta dalam proporsi.
3. Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar dan analisis pemutaran uang tunai.

Koordinasi

Demi tercapainya tujuan dari tugas pokok seorang pemimpin adalah sebagai kooordinator dalam arti sejauh mana ia sebagai pemimpin dapat menggerakkan serta mengkoordinasikan orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, serta hal-hal lain guna mencapai tujuan yang dikehendaki.

Money dalam Sutarto (1998:141) mengemukakan “bahwa pengertian koordinasi yaitu merupakan suatu pengaturan usah sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan”.

Kemitraan

Kemitraan atau sering disebut *partnership* yang diterjemahkan persekutuan atau perkongsian. Dengan demikian, kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama disuatu bidang usaha sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 2010:2)

Oleh Marbun (1996: 34-35) mengemukakan bahwa konsep kemitraan merupakan terjemahan (*partner*) atau bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen partisipatif.

Monitoring

Marjuki dan Suharto (1996:118) mengartikan monitoring adalah secara terus menerus melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan.

Menurut Suharto (2005:118) Monitoring merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan (*deviations*) yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan dengan apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penulis menyajikan data yang diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen, yaitu mempelajari data-data laporan dan

arsip yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda, adapun fokus penelitian ini :

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu) Adapun Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda yaitu berdasarkan 3 Indikator, yakni Peningkatan Pengelolaan Organisasi dan Manajemen, Peningkatan Akses Terhadap Sumber Modal, dan Peningkatan Melalui Akses Pasar :

Peningkatan Pengelolaan Organisasi dan Manajemen

Sesuai dengan hasil penelitian, peningkatan organisasi dan manajemen merupakan program pemberdayaan Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Samarinda yang diberikan kepada para pelaku Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda khususnya Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu berupa pelatihan-pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen para pelaku UKM. Para pelaku UKM begitu apresiatif dalam mengikuti pelatihan ini. Adapun tujuan dari diklat atau pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, bekerjasama dengan lembaga swasta nasional serta perguruan tinggi yaitu mendorong para wirausahawan dapat mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki, dengan proses yang kreatif dan inovatif, menjadikan UKM siap menghadapi tantangan krisis global.

Peningkatan Akses terhadap Sumber Modal

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dapat diketahui bahwa para UKM diberikan akses terhadap sumber modal dalam peningkatan usahanya. Peningkatan akses terhadap sumber modal ini di tempuh melalui peran sektor jasa keuangan yaitu pemerintah, swasta dan koperasi. Pemberian kredit ke-UKM merupakan salah satu upaya dalam rangka penyebaran resiko perbankan, sementara suku bunga kredit UKM sesuai dengan tingkat bunga pasar sehingga bank akan mempunyai margin yang cukup. Sector ini mempunyai ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha besar karena kurangnya ketergantungan pada bahan baku impor dan potensi pasar yang tinggi mengingat harga produk yang dihasilkan relative rendah sehingga terjangkau oleh golongan ekonomi lemah. Namun demikian, UKM juga mempunyai karakteristik pembiayaan yang unik, yakni diperlukannya ketersediaan dana pada saat ini, jumlah dan sasaran yang tepat, prosedur yang relative sederhana, adanya kemudahan akses ke sumber pembiayaan serta perlunya program pendampingan (technical assistance).

Oleh karena itu peran Dinas Koperasi dan UKM melalui peningkatan dana sumber modal ini dilakukan melalui pembinaan dalam langkah-langkah prosedur pengajuan kredit beserta penyuluhan tentang teknik mengelola kredit

bank yang sudah cair guna dapat dipergunakan secara efektif dan efisien dan menumbuhkembangkan usaha para pelaku UKM.

Peningkatan terhadap Akses Pasar

Dalam penelitian ini, pembinaan para kelompok UKM pada peningkatan terhdap akses pasar sangat mempunyai peranan penting, dikarenakan dibidang pemasaran banyak UKM yang tidak mengetahui bagaimana memasarkan produk mereka. Selama ini mereka hanya pandai memproduksi dalam menghasilkan suatu barang akan tetapi tidak pandai dalam memasarkannya. Penelitian pembinaan dalam peningkatan akses pasar ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peluang pasar dalam negeri dari berbagai jenis produk yang dihasilkan khususnya produk UKM di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan peran UKM dalam perekonomian di Indonesia. Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam pembinaan UKM melalui peningkatan akses pasar ini telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan peningkatan omset pada target pasarnya berupa bantuan peningkatan penampilan produk UKM, kemudian diselenggarakan program pameran atau pertemuan dagang yang biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Dengan pembinaan yang diberikan tersebut, para kelompok UKM akan lebih mudah dalam memasarkan produk mereka dan selanjutnya berkembang secara mandiri.

Hambatan Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Dalam proses pelaksanaan Peran Aparatur Dinas Koperasi dan UKM dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu), menemukan kendala-kendala yang menghambat dalam proses pelaksanaannya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Internal

Secara garis besar dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, kendala yang dihadapi oleh Aparatur Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu) terdapat pada masalah yaitu kurangnya infrastruktur maupun jumlah personil pegawai yang ada, jika dikaitkan dengan luasnya wilayah serta besarnya sentra binaan yang menjadi kewenangan Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda yang tidak sebanding.

Dalam pelaksanaannya Pembinaan Usaha Kecil Menengah mengalami hambatan dalam proses pelaksanaan pembinaan yang bersifat internal kurangnya tenaga pembina dan pembimbing dalam pelaksanaan pelatihan dan bimbingan keterampilan dalam melaksanakan pembinaan dalam pelatihan organisasi dan manajemen, pembinaan dalam peningkatan akses terhadap sumber modal serta pembinaan dalam peningkatan terhadap akses pasar

sehingga kurang mampu menjangkau semua UKM yang semakin tumbuh dan berkembang.

Eksternal.

Klim Usaha Belum Sepenuh Kondusif

Kebijakan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM. Meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar, sehingga para pelaku UKM yang masih berskala kecil enggan untuk didaftar sebagai pelaku UKM di Dinas Koperasi dan UKM untuk diberikan bimbingan. Mereka merasa tidak perlu dengan bimbingan yang diberikan karena usaha mereka yang kalah besar dengan pengusaha-pengusaha UKM yang lain.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, berikut ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Aparatur Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan SDM melalui Diklat dan Bimtek UKM di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda UluKota Samarinda dilakukan melalui pemberian pembinaan, bimbingan berupa pelatihan yang diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga swasta nasional melalui pendekatan berupa melanjutkan diklat-diklat di pusat serta diklat-diklat keterampilan teknis yang tradisional, mengembangkan kegiatan baru seperti peningkatan KSP/USP, pengembangan bengkel latihan kerja, serta pengembangan forum pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka penumbuhan wirausaha baru, serta bertujuan pencapaian target usaha kecil menengah yang berkualitas.
2. Peran Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam pemberdayaan UKM di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu melalui peningkatan terhadap akses sumber modal ditempuh melalui peran sektor jasa keuangan yaitu pemerintah, swasta dan koperasi dengan melakukan pengajuan kredit ke Bank bagi para pelaku UKM, yang sebelumnya diberikan arahan oleh aparatur Pembina Dinas Koperasi dan UKM kota Samarinda mengenai prosedur pengajuan kredit ke Bank bagi para pelaku UKM serta penyuluhan tentang teknik mengelola hasil pencairan dana dari Bank guna mengembangkan Usaha Kecil Menengah.

3. Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu dalam peningkatan akses pasar dilakukan melalui kegiatan promosi berupa penyelenggaraan pameran hasil UKM yang biasa disebut EXPO dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa fasilitasi perijinan tempat, dan menyiapkan semua kebutuhan selama kegiatan pameran berlangsung. Kegiatan pameran hasil UKM ini diselenggarakan sebanyak 2 tahun sekali dan diikuti para peserta Kelurahan Jawa Ulu dan pelaku UKM lainnya yang telah terdaftar sebelumnya.
4. Hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Samarinda dalam proses pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu) yang termasuk dalam internal yaitu kurangnya jumlah personil atau aparatur yang memberikan bimbingan ataupun pelatihan bagi para kelompok UKM dikarenakan UKM yang semakin tumbuh dan berkembang sehingga jangkauan kurang efektif dan efisien. Kemudian faktor penghambat eksternal yaitu iklim usaha yang belum kondusif yaitu terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar serta, sulitnya mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah sehingga sulit untuk mendirikan usaha.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas tentang peran Dinas Koperasi dan UKM di Kota Samarinda (studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu) penulis ingin memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam peningkatan SDM, Dinas Koperasi tidak hanya memberikan pelatihan berupa diklat keterampilan teknis yang tradisional, mengembangkan kegiatan baru seperti peningkatan KSP/USP, pengembangan bengkel latihan kerja, bengkel latihan kerja yang bersifat menumbuhkembangkan UKM, akan tetapi lebih baik para pelaku UKM juga diberikan keterampilan berupa design kemasan baru yang lebih kreatif dan inovatif, agar hasil produk yang mereka buat, dapat menarik para konsumen karena dalam hal pengemasan produk kurang diperhatikan, padahal kemasan juga merupakan unsur penting dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda perlu menambahkan tenaga terampil dalam bidang design produk yang dapat memberikan pelatihan bagi para pelaku UKM di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu.
2. Dalam peningkatan akses pasar, selama ini masyarakat Kelurahan Jawa kurang diikutsertakan dalam pameran di luar Kota Samarinda, mereka hanya diikutsertakan dalam pameran daerah saja sehingga membuat produk mereka hanya di kenal sebatas daerah mereka. Dengan diikutsertakan pameran ke luar Kota, tidak menutup kemungkinan bahwa produk yang

- mereka jual akan dikenal lebih luas (tidak hanya di dalam daerah saja) dan disukai masyarakat luar daerah Samarinda yang kemudian akan mendapatkan pesanan dari daerah luar yang dapat menambah keuntungan dari produk usaha mereka sehingga dapat berkelanjutan dan berkembang.
3. Luasnya wilayah binaan serta jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang terus bertambah tidak sebanding dengan kondisi lembaga/instansi Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda yang kurang memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik dilihat dari jumlah aparatur maupun infra struktur yang tersedia. Oleh karena itu diperlukan program yang efektif dan efisien untuk menjangkau semua binaan UKM secara merata dan berkesinambungan yaitu dengan meningkatkan kemampuan SDM Aparatur Pembina dalam layanan data dan informasi berbasis Web (informasi teknologi, hal ini dapat dilihat dari pembinaan UKM oleh aparatur yang masih menggunakan media penyebaran leaflet (pemberitahuan menggunakan media tulis). Oleh karena itu untuk mengantisipasi kesenjangan keterbatasan kemampuan lembaga/institusi tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan dengan memaksimalkan potensi organisasi yang ada dan memanfaatkan tingkat kemajuan Teknologi Informasi (TI) yang dapat dilakukan dengan melaksanakan pelatihan teknis / diklat teknis bagi aparatur Pembina dalam pelayanan data informasi berbasis web dalam rangka peningkatan kemampuan terhadap pemanfaatan tingkat kemajuan informasi serta kinerja yang efektif dan efisien.
 4. Banyaknya masyarakat Kelurahan Jawa yang ingin mendirikan UKM di daerah mereka, karena letak yang strategis dan terjangkau di Kota Samarinda, selama ini terbentur oleh sulitnya mendapatkan ijin untuk mendirikan usaha mereka karena dipengaruhi oleh proses yang panjang serta mahalnya biaya untuk mendirikan usaha. Sebaiknya Dinas Koperasi dan UKM mengkaji ulang bagaimana agar para calon pelaku UKM dapat mendirikan usahanya dengan mudah, tanpa proses yang panjang serta biaya yang murah. Salah satunya dengan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan berkoperasi karena dengan menjadi anggota koperasi mereka akan mengerti bagaimana cara simpan pinjam uang, serta mengelola pemasukan dan pengeluaran mereka selama memproduksi dalam hal menjual produk yang mereka hasilkan.

Daftar Pustaka

- Anonim. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Gunawan, Adi. 2003. *“Kamus Praktis Bahasa Indonesia”*, Kartika, Jakarta.
- Nurhajati. 2005. *“Paradigma Baru Pembangunan Usaha Kecil Menengah untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi”*, Malang, UNISMA
- _____. 2008. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bandung : Fokusmedia.

- _____. 2012 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Samarinda: Perda Samarinda.
- _____. 2014. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Samarinda.
- _____. 2015. *Monografi Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu*. Samarinda : Kelurahan Jawa.
- _____. 2010. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
- Soekanto, Soerjono. 2005. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2003. "*Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*", Fokusmedia, Bandung.
- Simanjuntak, P.J. 1985. "*Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*", BPFE UI, Jakarta. Jamasy, O. 2004. "*Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*", Jakarta Selatan : Blantika.
- Tjokowinoto, Moeljono. 2007. "*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Shardlow, 1998. "*Modern Social Work Practice*", Salford University, Norway.
- Hidayat, S. 1994. "*Pembinaan Perkotaan di Indonesia*", Bina Askara, Jakarta. Widjaja. 1986. "*Peranan Motivasi dalam Kepemimpinan*", Bina Askara, Bandung.
- Tohar, M. 2000. "*Membuka Usaha Kecil*", Kanisius, Yogyakarta.
- Suhardono, 1994. "*Peran Kepemimpinan Lembaga Daerah*", Fokusmedia, Bandung.
- Musanef, 1991. "*Manajemen Kepegawaian di Indonesai*", Gunung Agung, Universitas Michigan. Hidayat, S. 1979. "*Pembinaan Perkotaan di Indonesia*", Bina Askara, Bandung.
- Baswir, Revrosond. 2000. "*Koperasi Indonesia*", BPFE Yogyakarta. Downey,
- Steven. 1992. "*Manajemen Agribisnis*", Airlangga, Jakarta.
- B.N, Marbun. 1996. "*Kamus Politik*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nazir, 2003. "*Metode Penelitian, Cetakan Kelima*", Jakarta, Ghalia.
- Moleong, Lexy J. 2007. "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*", PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Arikunto, S. 2002. "*Prosedur Suatu Penelitian Kualitatif: Pendekatan Pendek*", PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Milles. B. Mattew dan A. Michael Huberman, 1997, "*Analisis Data Kualitatif*", Universitas Indonesia, Jakarta.
- Alma, Buchari. 2009. "*Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*", Alfabeta, Bandung. Nitisusanto, Mulyadi. 2010, "*Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*", Alfabeta, Bandung.

Sumber Lainnya :

Surat Kabar

Pemberdayaan UKM di Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Pos,
13 Februari 2015.

Sumber Internet

<http://www.bappeda.samarinda.go.id/profil.08.php>. (diakses 10 april 2015)

Dokumen-dokumen

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012 *tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda